

FENOMENA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEREMPUAN
(Studi Keterlibatan Perempuan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Surabaya)

Winny Wahyu Hutami

071311433075 (Prodi Sosiologi, FISIP, UNAIR)

ABSTRAK

Perekrutan dan keterlibatan perempuan menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja menjadi terobosan baru pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi konflik yang seringkali terjadi antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat. Selain itu juga untuk menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Sebab dengan adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan lebih mengedepankan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Studi ini memfokuskan pada keterlibatan perempuan dalam bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa data deskriptif mengenai lisan maupun tulisan serta tingkah laku yang diamati dari subjek yang sedang diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fenomenologi oleh Alfred Schutz dan teori Feminisme Struktural dicetuskan oleh Miriam Johnson. Teknik penentuan informan yang digunakan melalui metode *purposive*. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan partisipasi langsung di lapangan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: 1) perempuan – perempuan yang bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan ingin lebih baik dan mapan secara ekonomi meskipun sebelumnya tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai tugas dan pekerjaan sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan; 2) tugas yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan merupakan dikhususkan untuk bersosialisasi kepada masyarakat dengan lembut, humanis dan santun serta bernegosiasi ketika akan dilaksanakan penertiban.; 3) anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan memilih bertahan dengan pekerjaannya dengan beragam alasan yaitu sudah nyaman dengan pekerjaannya atau karena baru menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan hingga memiliki banyak tanggungan hidup serta tidak mungkin mencari pekerjaan baru karena usia yang sudah tidak produktif.

Kata kunci : fenomena, perempuan, Satuan Polisi Pamong Praja

PENDAHULUAN

Studi ini mencoba menjelaskan tentang keterlibatan perempuan bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Era globalisasi menuntut perubahan pada kehidupan masyarakat, salah satu contohnya yaitu menuntut perubahan dari tatanan pemerintahan. Pemerintahan yang menggunakan sistem dulunya selalu sentralistik kini berubah menjadi desentralistik. Menanggapi perubahan tersebut kemudian muncul Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang mengatur mengenai asas desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, menyeluruh dan bertanggung jawab. Kewenangan yang diharapkan mampu memaksimalkan dalam mengurus daerah masing – masing dan mengembangkan serta menggali potensi daerah.

Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 148 ayat 1 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa setiap pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membentuk instansi, dinas, badan, instansi maupun lembaga teknis lain yang sesuai dengan pilihan masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang optimal dan memuaskan dari pemerintah. Sehingga dengan demikian, pemerintah daerah membentuk organisasi yang dapat mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur seperti yang diharapkan seluruh masyarakat. Organisasi perangkat tersebut dikenal dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja atau merupakan perangkat pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertugas untuk menjaga ketentraman dan memelihara ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dinaungi

langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina. Selain menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu melalui peraturan kepala daerah. Oleh karena itu posisi Satuan Polisi Pamong Praja bisa dikatakan berperan penting dalam kepemimpinan kepala daerah.

Kaitannya dengan keamanan membuat Satuan Polisi Pamong Praja tidak luput dari perhatian masyarakat. Tetapi disayangkan gambaran mengenai Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai dengan harapan. Banyak gambaran miring tentang Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain karena seringnya masyarakat disuguhi dengan aksi represif dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terkesan arogan saat menjalankan perannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban daerah. Penertiban pekerja seks komersial, pembongkaran bangunan liar dan penertiban pedagang kaki lima selalu

berujung dengan bentrokan fisik. Tidak berlebihan jika masyarakat memandang anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota yang kasar, arogan dan penindas masyarakat kecil. Kesan tersebut dapat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja karena dapat menimbulkan konflik antara masyarakat yang mana tidak sesuai dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dewasa ini, wajah Satuan Polisi Pamong Praja berubah seiring dengan pola pendekatan para anggota yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan daripada kekerasan. Karena Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya juga dituntut untuk selalu siaga dengan kondisi dan situasi yang terjadi di daerah. Para anggota siap menertibkan kawasan – kawasan yang tidak memiliki ijin atau bodong. Beberapa daerah kini mulai merekrut petugas perempuan untuk mengisi pos – pos yang sebelumnya ditempati oleh petugas laki – laki. Salah satunya Kota

Surabaya yang sudah lama menerapkan pola pendekatan humanis pada masyarakat melalui petugas Satuan Polisi Pamong Praja perempuan.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 untuk membuat terobosan baru dalam instansi Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dilakukan untuk menghilangkan kesan kekerasan yang sudah terlanjur melekat pada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya. Perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan mulai dilakukan sejak bulan Mei 2011 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati. Syarat utama untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan tentu saja harus berpenampilan menarik dan minimal berpendidikan SMA. Sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan tentu juga harus memiliki fisik yang kuat untuk dapat melaksanakan tugas

dengan baik, oleh karena itu terdapat beberapa tes yang harus ditempuh dalam perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan diantaranya yaitu tes psikologi, tes wawancara dan serangkaian tes fisik seperti lari, push up, sit up serta baris – berbaris. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi Banpol (Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja) diseleksi melalui tahap pengajuan lamaran, berbeda dengan Satuan Polisi Pamong Praja perempuan pegawai negeri sipil yang tergantung penempatan dan SK (Surat Keputusan) kepala daerah.

Studi ini mencoba menjelaskan fenomena Satuan Polisi Pamong Praja perempuan di Surabaya dengan teori fenomenologi menurut Alfred Schutz. Dalam Sun'iyah (2011), dijelaskan bahwa reduksi fenomenologis, pengesampingan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang disebut sebagai suatu “arus pengalaman”. Sebutan

fenomenologis berarti studi tentang cara dimana fenomena hal – hal yang kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman – pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera. Selain itu Schutz (dalam Nindito 2005) beranggapan bahwa fenomenologi adalah bagaimana subyek memahami apa yang sedang atau telah ia lakukan.

Dalam studi ini peneliti juga mencoba menjelaskan dengan teori feminisme struktural Miriam Johnson yang fokus pada peran sosial tidak terkait dengan jenis kelaminnya. Teori feminis ini bukan hanya mengeksploitasi bagaimana seksualitas dan domestifikasi, tetapi juga dikaitkan dengan kehidupan domestik dan kehidupan dunia kerja pada ruang publik.

Pada penelitian sebelumnya (Sundari, 2013) yang mengkaji tentang

alasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan merekrut perempuan dan cara kerja perempuan dalam bagian pengawasan dan pengendalian penertiban umum Kota Padang, membahas bahwa perempuan diperlukan dalam rekrutmen Satuan Polisi Pamong Praja karena memiliki peran untuk melakukan penyamaran sebelum penertiban dilakukan di Kota Padang. Dalam hal ini perempuan dipercaya bisa membawa situasi dan kondisi menjadi kondusif sebelum, saat dan bahkan setelah penertiban dilakukan. Sebagaimana yang telah diyakini secara bersama oleh kebanyakan masyarakat Indonesia bahwa perempuan ditakdirkan untuk bekerja didalam rumah atau ruang domestik sehingga menjadi aneh jika perempuan bekerja di ruang publik yang berhubungan dengan kekerasan. Menurut Boserup (1970:15 – 25) dewasa ini, masyarakat yang melangkah ke zaman baru seperti masyarakat sekarang ini, antara lain

mengalami emansipasi perempuan, yaitu usaha perempuan dalam melepaskan diri dari peranan perempuan yang terbatas dalam sistem kekerabatan untuk mendapatkan pengakuan status baru, sesuai dengan zaman yang baru tentunya dalam keluarga maupun dalam masyarakat luas.

Oleh karena itu perempuan dewasa ini berani memilih dan melakukan pekerjaan – pekerjaan di ruang publik, selain itu juga berani melakukan pekerjaan yang banyak dilakukan oleh laki – laki yang berhubungan dengan kekerasan serta memerlukan fisik yang kuat. Semakin maju teknologi maka semakin banyak percakapan untuk memodernisasi yang kemudian terjadi pola pembagian kerja antara pria dan wanita (Boserup, 1970:5), dapat diartikan bahwa dengan mendapatkan kesempatan yang sama di berbagai bidang pada era modern seperti saat ini membuat perempuan juga menjadi lebih cakap dan memiliki peranan dalam pencarian nafkah. Terbukti dengan

berkembangnya industri pada abad ke – 19 presentase perempuan sebagai pekerja semakin meningkat baik terutama di negara – negara berkembang. Pekerjaan yang dapat dikatakan cukup berat yang berani dipilih perempuan salah satunya adalah sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Meski bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja perempuan yang tujuannya untuk meredam kemarahan pada saat penertiban dilakukan, akan tetapi memiliki fisik yang kuat juga diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja perempuan.

Terdapat Satuan Polisi Pamong Praja di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya Kota Surabaya. Di Surabaya Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi perhatian penting Walikota karena kinerjanya dalam menegakkan peraturan daerah dan pelayanan publik dituntut lebih. Faktanya Satuan Polisi Pamong Praja sering dan banyak melakukan penertiban pada bangunan liar yang tidak memiliki ijin, selain itu juga penertiban pada

pedagang kaki lima yang nekat berjualan di daerah yang dilarang seperti diatas pedestrian dan bahu jalan yang jelas mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Satuan Polisi Pamong Praja di Surabaya selalu identik dengan kekerasan, oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan peraturan merekrut perempuan untuk bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dengan syarat dan kriteria yang sesuai.

Perekrutan Satuan Polisi Pamong Praja perempuan dimulai sejak Mei 2011 tentu bukan perekrutan yang mudah dilalui oleh calon – calon Satuan Polisi Pamong Praja perempuan. Syarat utama untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan tentu saja harus berpenampilan menarik kemudian minimal berpendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas). Selain itu terdapat beberapa tes yang harus ditempuh lebih lanjut oleh para calon Satuan Polisi Pamong Praja perempuan, yaitu diantaranya tes psikologi, tes wawancara dan

serangkaian tes fisik seperti lari, push up, sit up dan baris – berbaris. Kebanyakan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan nantinya akan menempati posisi Banpol (Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja) dengan status kontrak selama tiga bulan, tetapi terdapat juga Satuan Polisi Pamong Praja perempuan yang berstatus pegawai negeri sipil dengan melakukan tes CPNS terlebih dahulu melalui pemerintah Kota Surabaya dan kemudian ditempatkan di instansi Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja perempuan di Surabaya pada kenyataannya sudah bekerja sesuai dengan tupoksi yang sudah ditetapkan oleh instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja, para perempuan yang sudah mengabdikan dirinya pada instansi tersebut juga sungguh – sungguh menjalankan tugasnya dan

mengorbankan urusan pribadinya demi memenuhi tugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kinerjanya, indikator Satuan Polisi Pamong Praja responsivitas, kualitas layanan, tanggung jawab, dan produktivitas. Tentunya juga terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja para anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan. Faktor pendukungnya yaitu, adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan jajaran samping, adanya ketetapan peraturan daerah Kota Surabaya, adanya loyalitas anggota, dedikasi serta kesamaptaan Satuan Polisi Pamong Praja yang tinggi, sarana dan prasarana, adanya kemampuan komunikasi yang baik dan pendekatan psikologi dengan masyarakat. Sedangkan yang menghambat yaitu pola pikir masyarakat yang belum bisa maju, kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pelanggaran ketertiban mengenai peraturan daerah yang berlaku, sifat

perempuan yang cenderung mengikuti perasaannya, permasalahan gender dan kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan.

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang alasan seorang perempuan memilih bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan di Surabaya. Dewasa ini fenomena tersebut menjadi peristiwa yang biasa dilihat oleh seluruh masyarakat Surabaya. Semakin lama jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan pun semakin bertambah, entah apa yang menjadi perhatian dari calon anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan tersebut. Yang jelas pekerjaan sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak jauh dari kasar dan kekerasan justru banyak diminati banyak kaum perempuan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti ingin mengetahui apa saja alasan anggota Satuan Polisi Pamong

Praja perempuan memilih pekerjaan tersebut.

HASIL PENELITIAN

Latar Belakang Perempuan Bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi pemerintah kota yang memiliki tugas pokok untuk menegakkan peraturan daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memiliki 606 orang pegawai yang terdiri dari 533 Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki dan 73 Satuan Polisi Pamong Praja perempuan. Dari keseluruhan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan, terbagi lagi ke dalam beberapa status dan jabatan. Rata – rata dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan yang memiliki status Banpol atau *outsourcing*

mengetahui lowongan Satuan Polisi Pamong Praja perempuan dari kerabat dan temannya, kemudian mendaftar hanya untuk coba – coba mencari pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya.

Alasan – alasan lain perempuan – perempuan tersebut mau bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja karena mendapat tawaran langsung bekerja di pemerintahan kota dan tes melalui jalur umum. Memang bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja perempuan dianggap berat oleh sebagian masyarakat sehingga tidak banyak yang ingin bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja perempuan di awal – awal tahun penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja perempuan. Apalagi bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja perempuan dengan berstatus sebagai Banpol atau *outsourcing* yang tergantung dengan sistem kontrak, di Satuan Polisi Pamong Praja kontrak untuk Banpol diperbarui selama tiga bulan sekali.

Awal mula diterima sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, perempuan – perempuan tersebut juga melaksanakan tes – tes fisik yang sudah ditetapkan oleh instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan tes ini tidak membanding – bandingkan antara laki – laki dan perempuan. Tes fisik tersebut dinamakan dengan tes semampu kita atau biasa disebut dengan tes semapta. Selain itu juga sebagai Satuan Polisi Pamong Praja perempuan harus benar – benar menjaga nama baik instansi dan menjaga perilaku karena dewasa ini masyarakat mulai bisa merubah pemikirannya terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Terdapat pula aturan – aturan khusus yang tidak boleh dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perempuan di tahun awal bekerja dan selama bekerja di instansi Satuan Polisi Pamong Praja.

Oleh karena itu mengapa Satuan Polisi Pamong Praja perempuan memang dituntut keras untuk bisa menjaga sikap dan perilaku selama bekerja, sebab instansi Satuan Polisi Pamong Praja tidak bekerja sendiri melainkan juga bekerja sama dengan SKPD lain yang ada di Surabaya guna memenuhi peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Di Satuan Polisi Pamong Praja sendiri sudah banyak kasus terjadi yang sangat tidak diharapkan yang merupakan akibat dari perilaku Satuan Polisi Pamong Praja perempuan itu sendiri maupun yang laki – laki. Dengan begitu ketika ada anggota bahkan karyawan Satuan Polisi Pamong Praja yang melanggar peraturan hukumannya langsung diberikan saat itu juga.

Perempuan memang selalu dituntut untuk bisa menjaga dirinya. Untuk nama baik diri anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan sendiri, nama baik keluarga dan nama baik instansi. Satuan

Polisi Pamong Praja Surabaya selalu mendidik dan memberi pengetahuan anggota – anggota dan karyawannya tidak hanya dengan pendidikan – pendidikan fisik melainkan juga dengan pendidikan moral selama anggota Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki maupun perempuan bekerja yang nantinya akan berguna bagi dirinya.

Tugas yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan

Perempuan – perempuan yang tengah bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja perempuan di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya, kebanyakan dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan awalnya tidak mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya kerja Satuan Polisi Pamong Praja perempuan. Sebagian besar dari perempuan – perempuan yang melamar kerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja perempuan tidak mengetahui pasti apa saja pekerjaan yang akan

dilakukannya ketika akan bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Perempuan – perempuan tersebut hanya mencoba peruntungan dalam pekerjaan lain yang tentunya dianggap lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, atau yang nekat saja melamar meskipun sebagian dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut belum memiliki banyak pengalaman bekerja.

Rata – rata perempuan yang sudah banyak memiliki pengalaman bekerja merasa tugas yang didapat dan wajib dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perempuan merupakan pekerjaan yang sangat tidak masuk akal. Sekian lama bekerja, sekitar dua hingga tiga tahun para perempuan – perempuan tersebut mulai memahami bagaimana pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja perempuan tentunya berawal dari tugas pertama ketika diterima bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja perempuan. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan harus tetap menjalankan

tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan dasar peraturan daerah Kota Surabaya meskipun perempuan – perempuan tersebut sama sekali belum memiliki pengalaman dan masih merasa malu dengan pekerjaannya sebagai Satuan Polisi Pamong Praja perempuan. Namun setelah berselang cukup lama, keberadaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan sudah mulai diterima oleh masyarakat karena tindakan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan sangat berbeda dengan yang sering dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki.

Mayoritas penempatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan agar dapat mencapai target penertiban yang sudah direncanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Selain mayoritas bertugas sebagai negosiator, anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan juga

memiliki tim khusus perempuan yang diberi nama tim rusa yang kemudian perempuan – perempuan di dalamnya disebar keseluruh tim yang membutuhkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan sudah ditempatkan di posisi yang memang sesuai dengan nalurinya sebagai perempuan. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan lebih dominan ditugaskan untuk menghadapi masyarakat sebagai tim rembug yang bersosialisasi dan bernegosiasi langsung dengan masyarakat. Penempatan perempuan pada tugas dan posisi tersebut berfungsi untuk meminimalisir dan berusaha menghilangkan konflik yang selama ini sering terjadi antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja perempuan sengaja dimaksimalkan pada tugas negosiasi dan sosialisasi meskipun terdapat Satuan Polisi Pamong Praja perempuan yang takut

dan merasa kesulitan menghadapi karakter masyarakat yang berbeda – beda.

Alasan Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan Masih Bertahan dengan Pekerjaannya.

Bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan merupakan kebanggaan untuk teman – teman perempuan di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, sebab sebagai seorang perempuan ingin merasa dihargai dengan diterima bekerja di ruang publik meskipun dengan pekerjaan yang dianggap cukup berat untuk seorang perempuan. Namun untuk beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan, pekerjaannya ini tidak dianggapnya sebagai pekerjaan yang berat sebab dilakukan dengan hati dan dikerjakan bersama – sama dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang lain.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan memilih bertahan dengan

pekerjaannya tersebut sebab pekerjaan tersebut sudah membuat para anggota Satuan Polisi Pamong Praja nyaman tanpa ingin mengundurkan diri atau mencari pekerjaan lainnya. Karena status perempuan – perempuan sudah mulai diakui oleh masyarakat sehingga membuat anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan *enjoy* melakukan pekerjaan dan tugas – tugas yang diperintahkan. dapat diketahui bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan sudah mulai bisa menerima pekerjaan tersebut dengan tugas – tugasnya yang diawal bekerja dianggap sebagai pekerjaan yang tidak wajar karena harus berdiri menjaga taman dan sebagainya. Sebagian besar mengatakan tetap bertahan karena sudah nyaman dan ingin menambah ilmu lagi di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya sedangkan terdapat juga Satuan Polisi Pamong Praja perempuan yang memilih bertahan karena alasan memerlukan

biaya hidup yang harus dipenhi dan karena usia yang sudah tidak lagi produktif.

PENUTUP

Kesimpulan

Perekrutan dan keterlibatan perempuan bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja memang sengaja dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi konflik yang sering terjadi antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat yang ditertibkan, serta untuk menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Sebab dengan begitu, adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan lebih ditekankan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

Dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai keterlibatan

perempuan bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Surabaya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perempuan – perempuan yang bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja saat ini dengan sadar mendaftarkan diri bekerja karena ingin lebih baik dan mapan secara ekonomi meskipun hanya berstatus tenaga kontrak atau Banpol namun penghasilannya dianggap cukup oleh para anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan. Secara sadar dan sengaja mendaftar, hal tersebut dilakukan karena alasan – alasan yang menurut anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan masuk akal meskipun banyak orang memandang sebelah mata atas pekerjaan sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja

perempuan. Saat awal diterima dan mendapatkan tugas pertama para anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan wajib menjalani masa orientasi selama tiga bulan yaitu dengan bekerja langsung di lapangan. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan ini rela dan dengan ikhlas melakukan pekerjaan dan tugas yang diberikan oleh atasan meskipun pekerjaannya merupakan pekerjaan yang tidak masuk akal, salah satu contohnya harus menjaga taman selama delapan jam waktu kerja dan nantinya akan kembali dijemput dengan mobil patroli Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Tugas – tugas yang dilakukan oleh perempuan – perempuan tersebut memang khusus ditugaskan untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan. Hal tersebut

dilakukan karena sesuai dengan pengalaman instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya selama ini. Sebab ketika hanya ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki yang turun ke lapangan dan melakukan penertiban atau patroli yang sering bermunculan justru konflik antara masyarakat dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja laki – laki. Munculnya kebijakan untuk merekrut perempuan untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja pertama kali dikeluarkan oleh Walikota Tri Rismaharini dengan alasan ingin Surabaya tetap menjadi kota yang aman, tertib dan nyaman namun tidak menimbulkan konflik antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat. Peraturan Daerah tetap harus terpenuhi tetapi

dengan cara yang lebih humanis dan lembut. Sehingga munculah perempuan sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan dikhususkan untuk bersosialisasi kepada masyarakat dengan lembut dan santun serta bernegosiasi ketika penertiban akan dilakukan. Tidak hanya sampai disitu, saat penertiban sedang berlangsung para anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan melakukan pengamanan terhadap perempuan, anak – anak dan lansia di sekitar lokasi penertiban. Dengan demikian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya kemudian mengeluarkan beberapa nama tim dengan tugas – tugas yang beragam. Salah satunya tim negosiator yang di dalamnya

banyak terdapat anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan.

3. Sudah cukup lama bekerja di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya membuat para perempuan tersebut banyak yang akhirnya memilih bertahan dengan pekerjaannya tersebut meskipun tidak dipungkiri beberapa dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan mengaku mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan instansi maupun sulit untuk membagi waktu antara bekerja dan keluarga karena perintah – perintah yang dikeluarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersifat mendadak. Namun banyak dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja memilih bertahan dengan pekerjaan tersebut dengan berbagai macam alasan. Mulai dari sudah

nyaman dengan pekerjaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau karena masih baru menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja perempuan hingga banyak memiliki tanggungan hidup dan tidak mungkin mencari pekerjaan baru meskipun sudah memiliki banyak pengalaman bekerja.

Ritzer, George. 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.

Siahaan, Hotman M. 1989. *Sejarah dan teori sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiman, Arief..1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: PT Gramedia.

Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Kedelapan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

Budiono, Bambang, (editor), 2012: 106. *Perjuangan Perempuan dan Keadilan Gender*, Pusham. Surabaya: Universitas Airlangga.

Nindito, Stefanus. 2005. *Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas Dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya

Noor, Alfian. 2016. *Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota*

- Samarinda. Samarinda:
Universitas Mulawarman.
- Sundari. 2013. *Rekrutmen Perempuan Sebagai Tugas Pengaman Kota. Alasan dan Cara Kerja Perempuan dalam Bagian Pengawasan dan Pengendalian Penertiban Umum Satpol PP Kota Padang.* Padang:
Universitas Andalas.
- satpolpp.jatimprov.go.id/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1088Itemid=30 (diakses pada 13 Oktober 2016)
- surabaya.go.id (diakses pada 5 Desember 2016)
- staff.uny.acid (diakses pada 9 Januari 2017)

Skripsi

- Aprilianti, Sonya. 2014. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Perempuan dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat: Studi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.* Skripsi. Malang:
Universitas Brawijaya.

Website

- satpolpp.surabaya.go.id (diakses 13 Oktober 2016)

